



# LKjIP 2025



**DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
Jl. Buru, ☐ 0914-21247 Masohi 97511





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah disusun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.

LKJiP Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025, memiliki peran strategis, dimana laporan ini tidak hanya dipergunakan untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan Program Pembangunan Strategis Dinas Perikanan periode lima tahun kedepan. Dimana Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah harus juga mendukung program-program yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan LKJiP dimaksudkan untuk menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, informasi kinerja yang diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta informasi keuangan organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Penyusunan LKJiP ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKJiP ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Dengan telah tersusunnya LKJiP Dinas Perikanan Tahun 2025 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKJiP ini. Semoga LKJiP ini dapat mencerminkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025.

Masohi, Februari 2026

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



**HARIS M. BANDJAR, S.Pi. M.Si**  
**NIP. 19670227 199301 1 006**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BABI. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan .....	2
1.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah .....	5
1.5 Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja .....	9
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	10
2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.....	10
2.2 Tujuan, sasaran dan Indikator sasaran .....	11
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	12
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	16
<b>BABIII. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	18
3.1 Capaian Kinerja 2025 .....	18
3.2 Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capain Kinerja tahun sebelumnya .....	21
3.3 Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Dengan target Akhir Renstra .....	22
3.4 Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi nasional dan provinsi.....	23
3.5 Analisis penyebab keberhasilan/Kegagaln atau peningkatan/ Penurunan Kinerja .....	24
3.6 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya .....	26
3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan .....	27
3.8 Realisasi anggaran tahun 2025 .....	28
<b>BAB IV.PENUTUP</b> .....	33
4.1 Kesimpulan .....	33
4.2 Saran/Rekomendasi .....	34

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Matriks RENSTRA 2025-2029 Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.....	31
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah .....	32
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.....	35
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah .....	39



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKJiP Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah serta Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029. Pada LKJiP Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2025.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029. Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dipertanggungjawabkan melalui pengukuran capaian kinerja dari program dan kegiatan tersebut

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sasaran dapat dilaksanakan sesuai dengan target atau secara presentase capaian ukuran keberhasilan dengan kategori capaian sasaran sebesar 100,00% (**Berhasil**) dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.



Pengukuran juga dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Tahun 2025 yang meliputi 3 (tiga) indikator antara lain :

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya) Kab/Kota tahun 2025 sebesar 155.587,55 ton dari target yang ditetapkan sebesar 152.216,80 Ton sehingga rasio capaian kinerja mencapai 102,47% (**Sangat Berhasil**).
2. Angka Konsumsi Ikan tahun 2025 sebesar 46,75 Kg/kapita/thn dari target yang ditetapkan sebesar 43,61 kg/kapita/thn sehingga rasio capaian kinerja mencapai 107,47% (**Sangat Berhasil**).
3. Nilai retribusi Sub Sektor Perikanan tahun 2025 sebesar Rp.830.373.000,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- sehingga rasio capaian kinerja mencapai 83,04% (**Tidak Berhasil**).

Pengukuran juga dilakukan terhadap capaian indikator kinerja kunci (IKK) dimana Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan tahun 2025 merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/Kota.

Selain pencapaian Sasaran Strategis, Realisasi Keuangan juga disajikan sebagai ukuran efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dalam bentuk dana yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Penyajian Akuntabilitas Keuangan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 serta Perhitungan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun 2025, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.262.376.560,-** yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasi anggaran mencapai **Rp. 6.974.456.205,-** atau **96,04%**.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan pertauran perundang-undangan yang baru yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Sejalan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah dirancang dan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian didefinitifkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang diimplementasikan dalam program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah di tahun yang akan datang.

## **1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KAB. MALUKU TENGAH.**

### **1.2.1 KEDUDUKAN DINAS PERIKANAN KAB. MALUKU TENGAH**

Kedudukan Dinas Perikanan adalah sebagai suatu organisasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang dalam melaksanakan tugas pemerintahannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah dan dipertegas dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah.

### **1.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KAB. MALUKU TENGAH**

Tugas Pokok Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah adalah Menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Perikanan serta Tugas lain yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah mempunyai fungsi antara lain :



- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perikanan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati di bidang Perikanan.

### 1.2.3 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

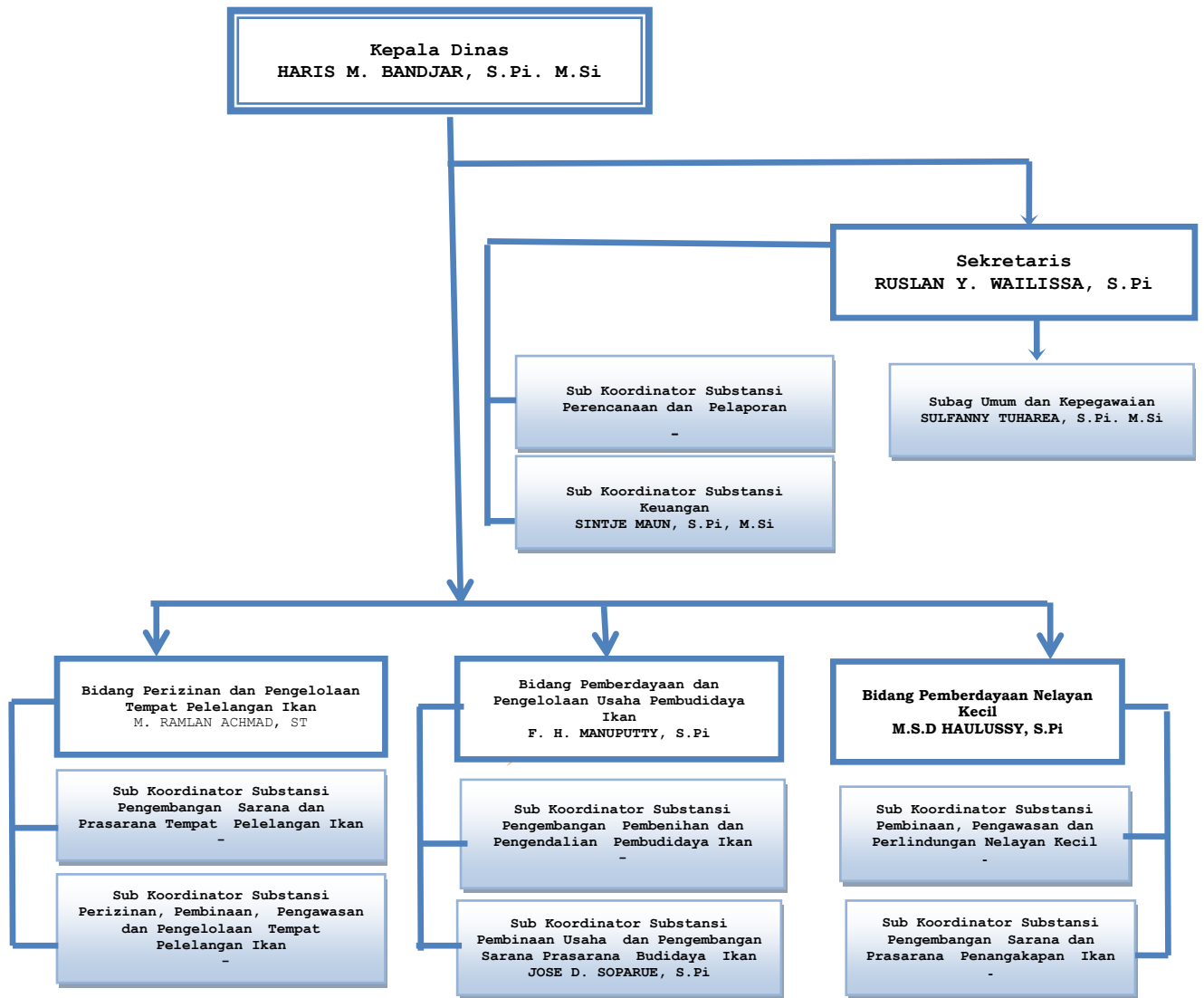
Disamping fungsi diatas sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan fungsi sesuai kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- I. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas
- II. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu :
  - a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
  - I. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, terdiri atas :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional
  - II. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional
  - III. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional



**GAMBAR 1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**





#### 1.2.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam Kegiatan dan tugas di bidang perikanan, maka dapat digambarkan mengenai gambaran organisasi Dinas Perikanan yang didukung dengan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan yang dijabarkan sebagai berikut :

##### 1.2.4.1 Data Kepegawaian

Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah di dukung oleh SDM sejumlah 37 orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 6 orang yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) (Data sampai dengan akhir Tahun 2025) dengan rincian sebagai berikut :

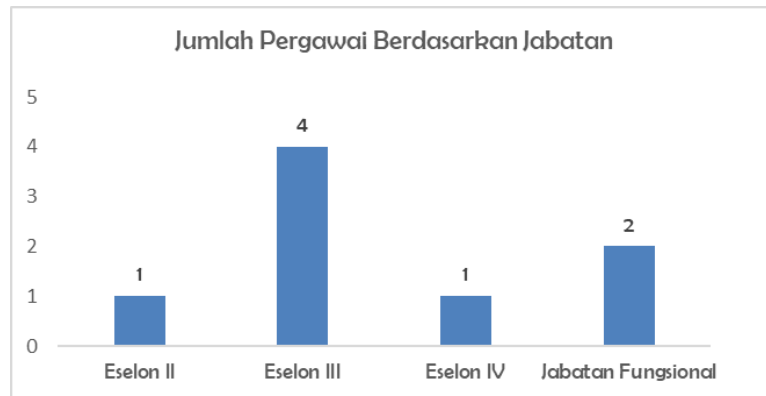
1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan : Jabatan eselon II sejumlah 1 Orang, Jabatan Eselon III sejumlah 4 orang, Jabatan Eselon IV sejumlah 1 orang, Jabatan Fungsional Umum (JFU) 2 Orang, Staf ASN sejumlah 29 orang dan Staf PPPK sejumlah 6 orang.
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan : S2 sejumlah 8 orang, S1 sejumlah 26 orang, D3 sejumlah 3 Orang dan SLTA sejumlah 6 orang.

Tabel 1.

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	4 Orang
3.	Eselon IV	1 Orang
4.	Jabatan Fungsional	2 Orang

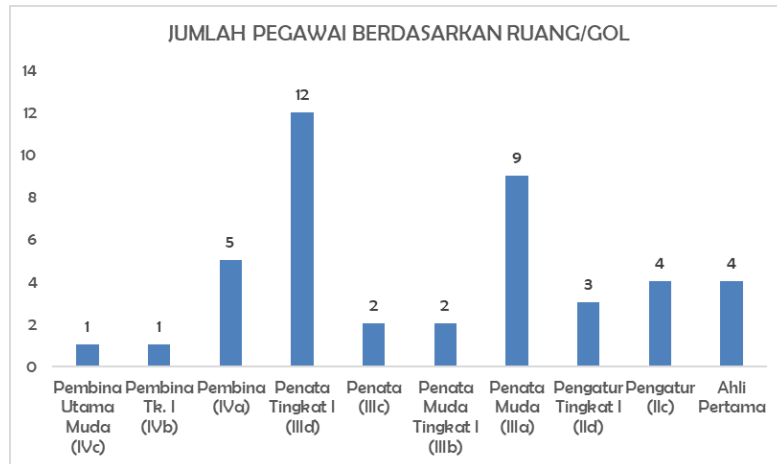
Grafik 1.  
Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah  
berdasarkan Jabatan



Tabel 2.  
Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah  
berdasarkan Ruang Golongan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian Pangkat/Gol.	Pendidikan					Total	
		SD	SMP	SMA	D3	S1		S2
1.	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina (IVa)	-	-	-	-	1	4	5
2.	Penata Tingkat I (IIIId)	-	-	-	-	10	2	12
	Penata (IIIc)	-	-	-	-	2	-	2
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	2	-	2
	Penata Muda (IIIa)	-	-	2	-	7	-	9
3.	Pengatur Tingkat I (IIId)	-	-	3	-	-	-	3
	Pengatur (IIc)	-	-	1	3	-	-	4
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda (IIa)	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ahli pertama (Golongan IX)	-	-	-	-	4	-	4
	<b>Jumlah</b>	-	-	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>43</b>

Grafik 2.  
Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah  
berdasarkan Ruang Golongan



#### 1.2.4.2 Sarana dan Prasarana

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana Dinas Perikanan yang mencukupi. Adapun data Asset / Modal yang dimiliki Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

Daftar Asset Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran  
Dinas Perikanan Kab. Maluku Tengah Tahun 2025

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1.	PC Unit	7	Baik	-	-
2.	Air Unit (AC)	2	Baik	-	-
3.	Filling Kabinet	4	Baik	-	-
4.	Meja Kerja	32	Baik	-	-
5.	Meja Rapat	6	Baik	-	-
6.	Sound System	1	Baik	-	-
7.	Kursi kerja eselon IV	7	Baik	-	-
8.	Kursi kerja eselon III	4	Baik	-	-
9.	Lemari Kayu	8	Baik	-	-
10.	Lemari Besi	5	Baik	-	-
11.	Kursi Kerja	3	Baik	-	-
12.	Kursi Lipat	54	Baik	-	-
13.	Printer	23	Baik	-	-



No	Uraian	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
14.	PC Unit Computer	16	Baik	-	-
15.	Laptop	20	Baik	-	-
16.	Laptop	10	-	Rusak	-
17.	AC Unit	11	Baik	-	-
18.	Alat Produksi Perikanan	8	Baik	-	-
19.	Mesin Kompesor	1	Baik	-	-
20.	Mesin Pompa Air	1	Baik	-	-
21.	Aquarium	1	Baik	-	-
22.	Tabung Oksigen	3	Baik	-	-
23.	Bak Fiberglass	5	Baik	-	-

Daftar Asset Jenis dan Kendaraan Bermotor  
Dinas Perikanan Kab. Maluku Tengah

No	Uraian	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan Roda Empat	3	Baik	-	-
2.	Kendaraan Roda Dua	44	Baik	-	-

### 1.2.4.3 Pembiayaan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan di perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang pelaksanaannya didukung oleh jumlah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Sumber Dana	Jumlah Anggaran
APBD Belanja Operasional	7.262.376.560
<b>Jumlah</b>	<b>7.262.376.560</b>



### 1.2.5 SISTEMATIKA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum Sistematika Penyusunan

##### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Tujuan dan Sasaran, Indikator yang menjadi Target Tahun 2025 dan perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan

##### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan, capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran

##### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka peningkatan kinerjanya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Urusan Kelautan dan Perikanan adalah salah satu urusan desentralisasi pemerintah daerah dalam menangani pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Maluku Tengah. Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan dilakukan secara bertahap terencana terpadu dan berkesinambungan. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 – 2029. Kebijakan pembangunan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah diarahkan pada modernisasi dan digitalisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan, terutama modernisasi perbenihan/perbibitan varietas baru bernilai tambah tinggi dan adaptif, sistem perbenihan berbasis masyarakat, dan pengelolaan kemurnian benih/bibit; peremajaan perkebunan rakyat secara intensif, progresif, dan berkelanjutan; pengembangan kawasan sentra produksi pangan (food cluster) sebagai salah satu sumber ekonomi baru dari kawasan/wilayah; adopsi pertanian presisi, digitasi pertanian, dan teknologi pertanian regeneratif; penerapan standar dan ketelusuran terhadap proses dan produk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan; serta efisiensi dan integrasi antara infrastruktur dengan distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang terpilih pada tahun 2025-2029 yaitu “ **Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun dan berkeadilan** ”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 5 misi yang dijabarkan berikut yaitu :

1. Membangun SDM Yang berkualitas, Sehat dan Terampil dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Menurunnya Prevelensi stunting, Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya daya beli Masyarakat, dan Meningkatkan kualitas keluarga, kelompok rentan dan kesetaraan gender



2. Meningkatkan Daya Saing dan Stabilitas Perekonomian Daerah dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatnya produktivitas sektor unggulan (Perikanan, Pertanian dan Pariwisata) berbasis teknologi dan inovasi, Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah, Meningkatnya pertumbuhan usaha daerah dan Meningkatnya kemandirian dan ketahanan pangan.
3. Membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan pelayanan public dan Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan desa.
4. Membangun ketahanan sosial budaya dan lingkungan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Terwujudnya keadilan hukum, demokrasi serta ketentraman dan ketertiban masyarakat berbasis nilai budaya dan agama
5. Membangun kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan, Meningkatnya Kualitas Mitigasi dan Penanganan Bencana dan Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup dan ketahanan sumber daya air.

Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah mendukung kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah pada misi ke 2 yaitu “ **Meningkatkan Daya saing dan Stabilitas perekonomian Daerah**” dengan sasaran “**Meningkatnya produktivitas sektor unggulan (Perikanan, Pertanian dan Pariwisata) berbasis teknologi dan inovasi, Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah**”. Misi tersebut mengandung maksud untuk memantapkan perekonomian memantapkan perekonomian Kabupaten Maluku Tengah menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri, dan pariwisata.



Kabupaten Maluku Tengah dengan potensi sektor kelautan dan perikanan berupa laut dengan Panjang garis Pantai 1.256,23 Km, Mutiara 367,3 Ha, Rumput laut 598,6 Ha, Teripang 417,9 Ha, Keramba Apung 545, 0 Ha, Kerang kerangan 680,6 Ha, Tambak udang dan Bandeng 7.872,9 Ha, Tambak Kepiting 7.905,8 Ha, kolam 69,7 Ha serta sebanyak 18031 Rumah Tangga Perikanan (RTP).

Sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 68 Tahun 2021. Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 2025-2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada atau mungkin timbul sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 menetapkan perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat dalam Tabel sasaran serta target dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Matriks Rencana Startegis  
Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan		Rasio PDRB Perikanan (%)	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	6,05	6,14	6,23	6,32	6,41	6,51
	Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/Kota (Ton)	151.912,75	151.988,7	152.064,7	152.140,73	152.216,81	152.292,91
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	43,50	43,52	43,55	43,57	43,59	43,61



Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah	Nilai Retribusi Sub sektor Perikanan	1.000.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah)	75,0	74,02	74,04	74,06	74,1	74,12

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah yang mencakup misi, tujuan sasaran dan cara dalam mencapai tujuan serta sasaran.

## 2.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

### 2.2.1 TUJUAN

Tujuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah selaras dan sejalan dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah, dimana di dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah memiliki tujuan yaitu "**Mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dan biru yang tangguh dan berdaya saing**". Tujuan Dinas Perikanan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas maka, ditetapkan tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Maluku Tengah yaitu "**Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan**" dengan indikator tujuan sebagai berikut :



Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1. Rasio PDRB Perikanan (%)	10,9	11,9
2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	6,05	6,51

### 2.2.2 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Prinsipnya sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumberdaya dapat efisien dan efektif.

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan memiliki tiga sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah yaitu :

1. Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah

Dalam sasaran yang hendak dicapai di atas maka, disertai dengan penentuan indikator sasaran yang terukur sebagai acuan dalam pengukuran capaian kinerja Dinas Perikanan, yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan dengan indikator sasarnya :
  - a. Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya )Kabupaten/Kota (Ton). Indikator sasaran ini dihitung berdasarkan jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2025.



- b. Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun). Indikator sasaran ini dihitung berdasarkan Jumlah Serapan Ikan dalam Rumah Tangga Kab. Maluku Tengah di bagi Jumlah Penduduk tertimbang (Jiwa0, hasilnya dinyatakan dalam (kg.kapita/tahun).
2. Sasaran II yaitu Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah, dengan indikator sasarannya :
  - a. Nilai Retribusi Sub Sektor Perikanan. Indikator sasaran ini di hitung berdasarkan jumlah hasil produksi perikanan pada Coolstorage CV Rendi Arnavad (kg/tahun) dikali Rp.1000,-/Kg.
3. Sasaran III yaitu . Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah, dengan indikator sasarannya :
  - a. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Indikator sasaran ini di hitung berdasarkan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja. Nilai Sakip Perangkat Daerah dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Maluku Tengah.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Renstra. Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah menetapkan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 – 2029. Program dimaksud merupakan program prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasi ke dalam program dan kegiatan pembangunan Perikanan.

Program merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Dan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun



berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dinas Perikanan tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran bidang perikanan di Kabupaten Maluku Tengah. Pembangunan dan pelaksanaan urusan perikanan pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan melalui 4 program, 8 kegiatan dengan 25 sub kegiatan dengan nilai pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.262.376.560,- yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp
1	2	3
	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>7.262.376.560</b>
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>3.968.390.560</b>
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>176.120.000</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.800.000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.000.000
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA- SKPD	2.000.000
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2.000.000
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA- SKPD	2.000.000
	6 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	134.320.000
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.303.566.560</b>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.009.956.560
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292.610.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Rp
1	2		3
<b>3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>331.580.500</b>
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.381.000
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	16.890.000
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.300.000
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.009.500
<b>4.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>6.900.000</b>
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.900.000
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>77.789.500</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.689.500
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.100.000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>79.334.000</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.934.000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.400.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Rp
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>2.967.460.000</b>
<b>1.</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>2.967.460.000</b>
	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	200.000.000
	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	2.767.460.000
	3	Pelaksanaan fasilitasi Pendanaan,	-
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>200.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan</b>		<b>200.000.000</b>
	1	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	100.000.000
	2	Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>		<b>-</b>
	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>119.626.000</b>
<b>1.</b>	<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>119.626.000</b>
	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-
	2	Pemberiaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.626.000



### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja dengan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan kinerja Kepala Dinas Perikanan Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Di dalam perjanjian kinerja tahun 2025 telah diperjanjikan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada mengenai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan yang dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

#### Perjanjian Kinerja Eselon II – IV Dinas Perikanan Kab. Maluku Tengah

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya produksi perikanan, sarana dan prasarana, perlindungan dan pembinaan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	Jumlah Produksi Perikanan (tangkap dan Budidaya)kabupaten/Kota (Ton)	151.912,75 Ton
2.		Angka Kosumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	43,50 Kg/Kapita/thn
3.	Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah	Nilai Retribusi Sub sektor Perikanan	1.000.000.000
5.	Meningkatnya Pengembangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja OPD	5 Dokumen
6.	Meningkatnya Pengembangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	1 Dokumen
7.	Meningkatnya Pengembangan Data kepegawaian	Jumlah Kualitas Data Kepegawaian	1 Tahun
8.	Meningkatnya Pengembangan Data Aset Dinas	Jumlah Kualitas Data Aset	1 Tahun



No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target
9.	Meningkatnya Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan Kecil yang diberdayakan	190 Orang
10.	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Yang di Berdayakan	10 kelompok
11.	Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	100 Pelaku Usaha
12.	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Berupa DUK, Bezzeting, Absensi dan Buku Kontrol	Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian	4 Dokumen
13.	Terlaksananya Dukungan Administrasi Umum Surat Masuk dan Surat Keluar	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan dan didistribusikan	792 Surat
14.	Terlaksananya Dukungan Administrasi Kepegawaian Usulan Kenaikan Pangkat (KP) Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Pensiun	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat (KP) Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan dan Pensiun	19 Orang
15.	Terlaksananya Urusan Kerumahtanggaan Dinas	Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset	1 Dokumen



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tengah dalam pelayanan masyarakat di bidang perikanan dan kelautan. Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur capaian sasaran dengan indikator sasaran dan capaian kegiatan dengan indikator kinerja, yakni

##### 3.1.1. PENCAPAIAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan pada penetapan kinerja tahun 2025 dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 serta Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029, maka Dinas Perikanan dalam pengukuran capaian keberhasilan pembangunan bidang perikanan menetapkan sasaran kinerja Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan dengan indikator kinerja berupa Jumlah produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/Kota (Ton) dan Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn) sedangkan sasaran kinerja meningkatnya pendapatan dan investasi daerah dengan indikator kinerja berupa Nilai Retribusi Sub sektor perikanan (Rp). Di mana di dalam pengukuran indikator sasarannya di hitung berdasarkan target dan realisasi tahun 2025. Dalam tahun 2025 melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berikut akan dijelaskan mengenai tingkat capaian target dengan realisasi yang dicapai oleh Dinas Perikanan pada tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Tujuan	:	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan
	Sasaran	:	Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan



**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja**  
**Jumlahn Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/Kota**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/Kota	151.836,83	155.587,55	102,47 %
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	146.563,73	146.549,07	99,99%
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5.273,10	9.038,48	171,41%

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi produksi perikanan tangkap sebesar 146.549,07 atau 99,99% ton sedangkan produksi perikanan budidaya sebesar 9.038,48 Ton atau 171,41% sehingga jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kab/kota pada tahun 2025 mencapai 155.587,55 Ton (One Data KKP Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2025) dengan capaian kinerja mencapai 102,47 %. sehingga dikategorikan (**Sangat Berhasil**). Realisasi Produksi Perikanan tangkap bila dibandingkan dengan target dikatakan tidak tercapai yang disebabkan pada tahun 2025 tidak ada bantuan armada penangkapan kepada Masyarakat nelayan sehingga menyebabkan produksi perikanan tangkap menurun dan tidak berpengaruh terhadap total produksi perikanan tahun 2025. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya terjadi peningkatan pada produksi budidaya udang pada Perusahaan PT. Wahana Lestari Investama (WLI) Sebesar 8.982,67 ton sedangkan untuk produksi lokal pembudidaya kabupaten Maluku Tengah hanya sebesar 52,26 Ton hal ini menggambarkan bahwa produksi perikanan budidaya lokal masih dikatagorikan sangat rendah dibandingkan dengan potensi lahan yang ada. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya dukungna infrastruktur perikanan budidaya dan kualitas sumberdaya manusia pembudidaya ikan.



<b>b.</b>	<b>Tujuan</b>	:	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan
	Sasaran	:	Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja**  
**Angka Konsumsi Ikan tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target ( )	Realisasi ( )	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	Angka Konsumsi ikan(kg/kapita/thn)	43,50 kg/kapita/tahun	46,75 kg/kapita/tahun	107,47 %

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi angka konsumsi ikan pada tahun 2025 mencapai 46,75 Kg/kapita/tahun (Hasil responden masyarakat Maluku Tengah sampai dengan Maret 2025) dengan capaian kinerja mencapai 107,47% sehingga dikategorikan **(Sangat Berhasil)**. Realisasi peningkatan angka konsumsi ikan disebabkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan karena ikan merupakan salah satu jenis sumber protein hewani, selain daging ayam, daging sapi, dan berbagai jenis olahan lainnya seperti naget ikan, abon ikan, bakso ikan serta masakan ikan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dan masyarakat semakin memilih ikan sebagai bagian dari diet sehat mereka.

<b>c.</b>	<b>Tujuan</b>	:	Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan
	Sasaran	:	Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Kinerja**  
**Nilai Retribusi Sub sektor Perikanan Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah	Nilai retribusi Sub Sektor Perikanan	1.000.000.000	830.373.000	83,04 %



Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator nilai retribusi sub sektor perikanan pada tahun 2025 mencapai Rp.830.373.000 dari target Rp.1.000.000.000 dengan capaian kinerja mencapai 83,04% Sehingga dikategorikan **(tidak berhasil)**. Tidak tercapainya target indikator nilai retribusi sub sektor perikanan karena dikeluarkannya undang-undang No 01 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan dasar pungut retribusi izin usaha perikanan pada PT Wahana Lestari Investama terhenti sehingga menyebabkan retribusi sub sekotr perikanan tidak mencapai target yg sudah ditetapkan.

### 3.2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Sebagai sebuah proses dari akuntabilitas, serta pengukuran kinerja, maka Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 merupakan tahun pertama atau tahun transisi Renstra periode 2025 – 2030.

Perbandingan Realisasi capaian Kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun 2024 dapat dijabarkan pada tabel perbandingan capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi (%)	
			2024	2025
Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	• Jumlah Total roduksi perikanan (Tangkap dan budidaya ) kab/kota	• 151.836,83 Ton	• 151.836,83 ton	• 155.587,55 ton
	• Angka Konsumsi ikan	• 43,50 Kg/Kapita/Thn	• 43,86 kg/kapita/thn	• 46,75 kg/kapita/thn (67,60 %)
Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah	• Nilai retribusi Sub Sektor Perikanan	• Rp.1.000.000.000	• Rp.4.000.000.000	• Rp.830.373.000



### 3.3. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah menargetkan indikator sasaran pada akhir tahun Renstra 2030 diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Renstra 2030	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian
Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	• Jumlah total produksi Perikanan (Tangkap dan budidaya) kab/kota	• 152.216,80 Ton	• 155.587,55 ton	• 102,47 %
	• Angka Konsumsi Ikan	• 43,61 Kg/kapita/thn	• 46,75 Kg/kapita/thn	• 107,47%
Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah	• Nilai retribusi Sub Sektor Perikanan	• Rp.175.000.000	• Rp.830.373.000	• 83,04 %

Berdasarkan tabel di atas, maka target jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) pada akhir tahun renstra 2030 sebesar 152.216,80 Ton dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 155.587,55 ton atau (102,47%).

Dari target akhir renstra 2030 bila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2025 dapat dianalisis bahwa capaian akhir Renstra tahun 2030 akan terealisasi sampai 100 % dengan capaian yang melebihi 2,47%.

Target angka konsumsi ikan pada akhir tahun renstra 2030 sebesar 43,61 Kg/kapita/tahun. dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 46,75 kg.kapita/tahun atau (107,47%). Dari Target Akhir Renstra 2030 bila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2025, maka dapat dianalisis bahwa capaian akhir renstra tahun 2030 akan terealisasi sampai 100 % dengan sisa capaian masih tersisa 7,47%.

Target nilai retribusi sub sektor perikanan pada akhir tahun renstra 2030 sebesar Rp.175.000.000, dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar Rp.830.373.000 atau (83,04%). Dari target akhir renstra 2030 bila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2025 dapat dianalisis bahwa capaian akhir Renstra tahun 2030 akan terealisasi sampai 100 % dengan capaian yang masih tersisa 16,96%.

Target nilai retribusi sub sektor perikanan yang masih tersisa ini menjadi tanggung jawab Renstra Dinas Perikanan tahun 2025-2030.



### 3.4. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN REALISASI NASIONAL DAN PROVINSI

Produksi Perikanan Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu penyumbang produksi perikanan terbesar untuk Provinsi Maluku, produksi perikanan pada tahun 2025, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya memiliki kontribusi terhadap pencapaian produksi perikanan provinsi Maluku. hal ini dapat kita jelaskan melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel Kontribusi Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Maluku Tengah Dengan Nasional**

Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan	Kontribusi Terhadap Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Nasional					
	Nasional Realisasi 2024	Kab.Maluku Tengah Realisasi 2024	Kontribusi	Nasional Realisasi 2025	Kab.Maluku Tengah Realisasi 2025	Kontribusi
Perikanan Tangkap	5.006.243,68 Ton	146.563,73 Ton	2,93 %	Belum Divalidasi	146.549,07 Ton	- %
Perikanan Budidaya	12.903.795,39 Ton	5.273,10 Ton	0,04%	Belum Divalidasi	9.038,48 Ton	-%
Konsumsi Ikan	81,75 Kg/kapita/thn	43,86 Kg/Kapita/Thn	53,65%	Belum Divalidasi	46,75 Kg/Kapita/Thn	-%

Catatan : Data Produksi Perikanan Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Aplikasi One Data Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Angka Sangat-Sangat Sementara ) per 15 Januari 2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu penyumbang produksi perikanan pada tahun 2024 diantaranya Produksi Perikanan Tangkap memiliki kontribusi untuk nasional sebesar 2,93%, sedangkan produksi perikanan budidaya memiliki kontribusi untuk nasional sebesar 0,04%. dan untuk indikator Konsumsi ikan memiliki kontribusi untuk nasional 81,75%. Sedangkan untuk tahun 2025 produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya untuk nasional belum divalidasi Sedangkan untuk indikator Konsumsi ikan belum bisa mengetahui besarnya kontribusi nasional disebabkan data konsumsi nasional belum divalidasi sampai Januari 2025.

**Tabel Kontribusi Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Maluku Tengah Dengan Provinsi Maluku**

Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan	Kontribusi Terhadap Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Provinsi Maluku					
	Provinsi Maluku Realisasi 2024	Kab.Maluku Tengah Realisasi 2024	Kontribusi	Provinsi Maluku Realisasi 2025	Kab.Maluku Tengah Realisasi 2025	Kontribusi
Perikanan Tangkap	513.048.73 Ton	146.563,73 Ton	28,57 %	Belum Divalidasi	146.549,07 ton	- %
Perikanan Budidaya	251.727,62 Ton	5.273,10 Ton	2,09%	Belum Divalidasi	9.038,48 Ton	-%
Konsumsi Ikan	79,49 Kg/Kapita/Thn	43,86 Kg/Kapita/Thn	76,13%	Belum Divalidasi	46,75 Kg/Kapita/Thn	-%

Catatan : Data Produksi Perikanan Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Aplikasi One Data Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Angka Sangat-Sangat Sementara ) per 15 Januari 2026.



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu penyumbang produksi perikanan pada tahun 2024 diantaranya produksi perikanan tangkap memiliki kontribusi untuk Provinsi Maluku sebesar 28,57%, sedangkan produksi perikanan budidaya memiliki kontribusi untuk Provinsi Maluku sebesar 2,09%, dan Indikator Konsumsi ikan memiliki kontribusi untuk Provinsi Maluku sebesar 76,13%. Sedangkan untuk Tahun 2025 indikator Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi ikan belum bisa mengetahui besarnya kontribusi untuk Provinsi Maluku disebabkan data Provinsi Maluku belum divalidasi sampai Januari 2025.

### **3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Dinas Perikanan pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan memiliki indikator sasaran sebagai tolak ukur pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Indikator sasaran yang telah ditetapkan berupa jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kab/kota, Angka Konsumsi ikan dan Nilai retribusi sub sektor perikanan Pada tahun 2025,

Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah pada capaian sasaran Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan dengan indikator sasaran jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kab/kota dimana target jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kab/kota sebesar 151.836,83 ton dengan realisasi sebesar 155.587,55 Ton dengan capaian kinerja mencapai 102,47 %.

Menurunnya Produksi Perikanan tangkap pada tahun 2025 disebabkan oleh pola migrasi ikan, musim pemijahan, dan kondisi lingkungan yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan sedikit, selain itu juga faktor cuaca dan iklim yang sangat menentu dalam melakukan penangkapan. Sedangkan produksi perikanan budidaya disebabkan produksi export udang windu dari PT. WLi pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan.

Angka konsumsi ikan dengan target sebesar 43,50 kg/kapita/tahun dan realisasi konsumsi ikan sebesar 46,75 kg/kapita/tahun (dengan capaian kinerja mencapai 107,47%). hal ini disebabkan meningkatnya masyarakat dalam mengkonsumsi ikan dipengaruhi oleh adanya pengelolaan hasil perikanan pada olahan ikan Asap/Asar, olahan ikan asin, Naget Ikan, Abon Ikan, dan Bakso Ikan sehingga Tingkat konsumsi ikan oleh Masyarakat yang sangat tinggi walaupun dipengaruhi oleh naik turunnya harga ikan yang tidak menentu tetapi minat Masyarakat sangat tinggi dalam mengkonsumsi ikan.



Upaya yang akan dilakukan oleh dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2026 adalah :

- Dinas Perikanan selalu Melakukan Pengawasan terhadap PT. Wahana Lestari Investama (WLI) sehingga produksi perikanan budidaya (dalam hal ini budidaya udang) tetap meningkat.
- Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), memberikan penghargaan kepada kelompok nelayan, memfasilitasi kemitraan nelayan, dan memfasilitasi nelayan yang berhadapan dengan pihak luar.
- Meningkatkan Kualitas Sumberdaya manusia pembudidaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkualitas.
- Meningkatkan Sarana dan prasarana pembenihan serta pembesaran perikanan budidaya
- Membangun Sarana dan Prasarana Pakan Mnadiri untuk menunjang Produksi Periuikanan Budidaya
- Menyelenggarakan Pelatihan pengolahan ikan bagi masyarakat umum dan pelaku usaha perikanan.

### 3.6. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pelaporan kinerja adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi dilakukan berkaitan dengan sejauh mana organisasi telah mencapai tingkat produktifitas optimal atas dasar sumber daya yang telah digunakan/dimanfaatkan. Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 9.584.722.564,- dengan realisasi dari jumlah alokasi dana sebesar Rp. 8.646.115.340,- atau dengan serapan dana sebesar 90,21%. Berikut akan dijelaskan efisiensi penggunaan sumber daya melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	(3/4)*100
Meningkatnya produksi sarana dan prasarana perikanan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	Jumlah Total Produksi (Perikanan Tangkap dan budidaya)kab/kota	102,47%	96,78%	105,88%
	Angka Konsumsi Ikan	107,47%	96,51%	111,36%
Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah	Nilai Retribusi Sub Sektor Perikanan	83,04%	96,78%	85,80%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70,08%	95,64%	74,03%

Dari sudut pandang efektifitas , maka kinerja pencapaian sasaran terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan efisien. Hal tersebut tercermin



dari tingkat keberhasilan capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota  
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 2.967.460.000,- dengan realisasinya Rp. 2.886.551.201,- selanjutnya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasinya Rp. 178.992.587,- sehingga dapat dikatakan **efisien** penggunaan sumberdaya (masukan dana) sebesar 96,78% karena sasaran tercapai 102,42% dalam **kategori berhasil**.
- Angka Konsumsi Ikan  
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 2.967.460.000,- dengan realisasinya Rp. 2.886.551.201,- selanjutnya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 119.926.000,- dengan realisasinya Rp. 106.837.000,- sehingga dapat dikatakan **efisien** penggunaan sumberdaya (masukan dana) sebesar 111,36% karena sasaran tercapai 107,47% dalam **kategori berhasil**.
- Nilai retribusi sub Sektor Perikanan  
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 2.967.460.000,- dengan realisasinya Rp. 2.886.551.201,- selanjutnya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasinya Rp. 178.992.587,- sehingga dapat dikatakan **efisien** penggunaan sumberdaya (masukan dana) sebesar 96,78% karena sasaran tercapai 83,04% dalam **kategori berhasil**.
- Nilai SAKIP  
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.975.290.560,- dengan realisasinya Rp. 3.802.075.417,- sehingga dapat dikatakan **efisien** penggunaan sumberdaya (masukan dana) sebesar 95,64% karena sasaran tercapai 70,08% dalam **kategori berhasil**.



### 3.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 melaksanakan 4 Program 8 Kegiatan dengan 25 sub kegiatan, dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksana tugas desentralisasi pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Maluku Tengah, program kegiatan yang dilaksanakan tersebut menunjang dalam pencapaian indikator kinerja utama dimana program-program yang memiliki efek langsung dalam pencapaian target kinerja yaitu program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan perikanan budidaya, program pengolahan dan pemasaran produksi hasil perikanan dan program penunjang urusan pemerintahan daerah, dapat dilihat pada tabel program/kegiatan di bawah ini :

No	Program/Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>3.975.290.560</b>	<b>95,64%</b>	<b>3.802.075.417</b>
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dok/3 laporan	176.120.000	10 Dok/3 laporan	162.880.000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dok	3.303.566.560	3 Dok	3.168.846.715
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	331.580.500	98,29	325.917.180
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	6.900.000	1 Unit	6.900.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun/1 laporan	77.789.500	1 tahun/1 laporan	59.692.000
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	79.334.000	4 Unit	77.839.522
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>100%</b>	<b>4.655.785.650</b>	<b>97,27%</b>	<b>3.853.900.650</b>
1.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	546 Orang	4.655.785.650	536 Orang	3.853.900.650
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	<b>89,50%</b>	<b>178.992.587</b>
1.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	10 Kelompok	200.000.000	10 Kelompok	178.992.587
IV	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>100%</b>	<b>119.626.000</b>	<b>89,31%</b>	<b>106.837.000</b>
1.	Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	130 Pelaku Usaha	119.626.000	130 Pelaku Usaha	106.837.000
	<b>TOTAL</b>		<b>7.262.376.560,-</b>		<b>6.974.456.205,</b>



Keempat program yang dilaksanakan diatas merupakan program yang memiliki dampak secara langsung pada pencapaian indikator sasaran jumlah Total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)kab/kota, angka konsumsi ikan dan nilai retribusi sub sektor perikanan.

Dalam pencapaian indikator kinerja capaian kinerja Dinas Perikanan juga mengalami kendala dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan yaitu :

### 1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- a. Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2026 mengalami penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sebelumnya apad tahun 2025 sebesar Rp.1.000.000.000,- menjadi Rp. 175.000.000,- hal ini disebabkan oleh hilangnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Izin Usaha Pembudidaya Ikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah akan memaksimalkan Kegiatan optimalisasi Tempat pelelangan Ikan (TPI) untuk menjadi sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) bidang perikanan, namun hal ini perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur TPI yang memadai.
- b. Armada penangkapan ikan (75%) masih didominasi oleh kapal berukuran kecil atau Perahu Tanpa Motor;
- c. Ketersediaan benih ikan yang terbatas untuk dibudidayakan sehingga sesudah masa panen tidak ada lagi benih yang akan di budidayakan dan juga masalah pada pakan ikan yang sulit di dapat.
- d. Hasil produksi budidaya ikan air payau maupun air laut belum memiliki rantai pemasaran seperti halnya produksi penangkapan
- e. Belum tersedianya pasar ikan yang refresentatifd sehingga menyulitkan nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan.
- f. Pemahaman masyarakat tentang penanganan mutu hasil perikanan masih rendah

### 2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Guna mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap, maka diperlukan strukturalisasi armada perikanan dengan motorisasi kapal-kapal perikanan dan penyempurnaan kelengkapan sarana penangkapan;
- b. Pembangunan dan pengembangan unit-unit pembenihan skala Rumah Tangga (HaSRAT) untuk memenuhi ketersediaan benih di sentra-sentra produksi budidaya perikanan air tawar.



- c. Aspek pemasaran hasil produksi budidaya air tawar perlu dirintis dan disiapkan agar memacu masyarakat untuk terus mengembangkan usaha budidaya
- d. Perlu adanya pasar ikan yang representatif sehingga menyulitkan nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan.
- e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada masyarakat/pelaku usaha tentang peningkatan mutu hasil perikanan

### 3.8. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.6.974.456.205,- dari jumlah alokasi dana sebesar Rp. 7.262.376.560,- atau dengan serapan dana sebesar 96,04% dengan perkembangan fisik 100%. Sisa anggaran APBD yang tidak dimanfaatkan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 287.920.355,- atau sebesar 4,0% merupakan hasil efisiensi penggunaan anggaran yang selanjutnya dikembalikan ke Kas Daerah.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran**  
**Dinas Perikanan**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp		SISA
			Belanja	%	
1	2	3	4	5	6=4-6
	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>7.262.376.560,-</b>	<b>6.974.456.205,-</b>	<b>96,04</b>	<b>287.920.355,-</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>3.975.290.560</b>	<b>3.802.075.417</b>	<b>95,64</b>	<b>(173.215.143)</b>
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>176.120.000</b>	<b>162.880.000</b>	<b>92,48</b>	<b>(13.240.000)</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.800.000	33.800.000	100,00	-
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00	-
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA- SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00	-
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00	-



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp		SISA
			Belanja	%	
1	2	3	4	5	6=4-6
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA- SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00	-
6	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	134.320.000	121.080.000	90,14	(13.240.000)
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.303.566.560</b>	<b>3.168.846.715</b>	<b>95,92</b>	<b>(134.719.845)</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.009.956.560	2.939.636.715	97,66	(70.319.845)
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292.610.000	228.210.000	77,99	(64.400.000)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00	-
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>331.580.500</b>	<b>325.917.180</b>	<b>98,29</b>	<b>(5.663.320)</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.381.000	14.300.000	99,44	(81.000)
2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	16.890.000	16.156.000	95,65	(734.000)
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.300.000	9.600.000	93,20	(700.000)
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.009.500	285.861.180	98,57	(4.148.320)
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.900.000	6.900.000	100,00	-
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.789.500</b>	<b>59.692.000</b>	<b>76,74</b>	<b>(18.097.500)</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.685.500	2.084.000	77,49	(605.500)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.100.000	39.608.000	69,37	(17.492.000)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	18.000.000	100,00	-
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.865.500</b>	<b>46.596.820</b>	<b>93,45</b>	<b>(1.498.474)</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.934.000	50.439.522	89,33	(1.498.474)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.400.000	7.400.000	100,00	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	100,00	-



No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp		SISA
			Belanja	%	
1	2	3	4	5	6=4-6
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>2.967.460.000</b>	<b>2.886.551.201</b>	<b>97,27</b>	<b>(80.908.799)</b>
7	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.967.460.000</b>	<b>2.886.551.201</b>	<b>97,27</b>	<b>(80.908.799)</b>
	1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	200.000.000	162.627.000	81,31	(37.373.000)
	2 Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	2.767.460.000	2.723.924.201	98,43	(43.535.799)
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>200.000.000</b>	<b>178.992.587</b>	<b>89,50</b>	<b>(21.007.413)</b>
8	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>178.992.587</b>	<b>89,50</b>	<b>(21.007.413)</b>
	1 Pengembangan Pembudidayaan Ikan Kecil	100.000.000	82.814.173	82,81	(17.185.827)
	2 Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000	96.178.414	96,18	(3.821.586)
IV.	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>119.626.000</b>	<b>106.837.000</b>	<b>89,31</b>	<b>(12.789.000)</b>
9	<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>119.626.000</b>	<b>106.837.000</b>	<b>89,31</b>	<b>(12.789.000)</b>
	1 Pemberiaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	119.626.000	106.837.000	89,31	(12.789.000)



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi bidang Perikanan dan Kelautan, dilaksanakan melalui rencana strategis dan rencana kinerja tahun 2025 yang memuat indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran. Dari hasil akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam form Pencapaian Sasaran serta penetapan kinerja diketahui bahwa hasil capaian kinerja organisasi Dinas Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Total produksi perikanan (tangkap dan Budidaya) kab/kota mampu mencapai hasil yang ditargetkan dengan rata-rata tingkat capaian dari indikator kinerja sebesar 102,47%.
2. Indikator Angka Konsumsi Ikan mampu mencapai hasil yang ditargetkan dengan rata-rata tingkat capaian dari indikator kinerja sebesar 107,47%.
3. Indikator Nilai retribusi Sub sektor perikanan mampu mencapai hasil yang ditargetkan dengan rata-rata tingkat capaian dari indikator kinerja sebesar 87.00%

### 4.2. SARAN/REKOMENDASI

Problematika pembangunan Perikanan senantiasa berkembang dan merupakan tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2025 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2025, antara lain:



1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, instansi pemerintah propinsi maupun pusat atau pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang Perikanan.
2. Komitmen pejabat/para pengambil keputusan dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan bidang Perikanan.
3. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.
4. Menjaga substansi akuntabilitas berjalan pada jalur yang tepat, yakni sebagai media input bagi para pengambil kebijakan untuk menilai efektifitas program dan kegiatan dalam kontribusinya mendukung

Sebagai kata akhir, kami Kepala Dinas beserta segenap aparat Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah mengharapkan agar LKJiP tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja keberhasilan sasaran dan tujuan pemerintah kabupaten.

Lampiran 1

**Rencana Strategik**  
**Tahun 2025 sampai dengan 2029**

**INSTANSI** : Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah  
**MISI 2** : **MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN SECARA ADIL DAN MERATA**  
**MISI 3** : **MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN BERDAYA SAING**  
**SASARAN RPJMD** : Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan (Perikanan, Pertanian dan Pariwisata) Berbasis Teknologi dan Inovasi Daya Saing Daerah

Tujuan	Sasaran		Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5
I. Meningkatkan kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan	1. Meningkatnya produksi perikanan, sarana dan prasarana pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (Ton)  2. Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	1. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya yang ramah lingkungan;  2. pemanfaatan lahan produktif untuk usaha budidaya;  3. pengembangan unit pembenihan masyarakat (HSRT);  4. pelatihan ketrampilan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;  5. Peningkatan daya saing produk perikanan diarahkan melalui pembangunan infrastruktur seperti Tempat Pelelangan Ikan, Cold storage, Unif Pengolahan Ikan (UPI) dan rumah kemasan  6. Dukungan akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar hasil perikanan	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap  2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya  3. Program Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan
	2. Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah	1. Nilai Retribusi sub sektor perikanan (Nilai)		
	2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Digitalisasi pelayanan dan data statistik sektoral Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah  2. Pemutakhiran SOP dalam penyelenggaraan birokrasi bidang perikanan  3. Peningkatan kapasitas SDM ASN Dinas Perikanan melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2025**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian Program	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
I	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan, sarana dan prasarana pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>146.563,73 Ton</b>	<b>2.967,460,000</b>
						<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>540 Orang</b>	<b>2.967,460,000</b>
						1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	200 Orang	200,000,000
						2 Pelaksanaan Fasilitas dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	68 Kelompok	2,767,460,000
						3 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pdanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 Unit Usaha	0
				Jumlah Produ Perikanan Budidaya	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>5.273,10 Ton</b>	<b>200,000,000</b>
						<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>10 Kelompok</b>	<b>200,000,000</b>
						1 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	5 kelompok	100,000,000
						2 Pemberiaan Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan Pelatihan	5 kelompok	100,000,000
						<b>Pengelolaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
						1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0
				Angka Konsumsi ikan	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>43,50 Kg/kapita/thn</b>	
			Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah	Nilai retribusi Sub sektor Perikanan		<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>119,626,000</b>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian Program	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
						1 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	0	0
						2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	100 Pelaku Usaha	119,626,000
<b>II</b>	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Perangkat	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>74.02</b>	
						<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9 Dok/2 laporan</b>	<b>176,120,000</b>
						1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	33,800,000
						2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2,000,000
						3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2,000,000
						4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2,000,000
						5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2,000,000
						6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	134,320,000
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3,303,566,560</b>
						1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bln	3,009,956,560
						2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	292,610,000
						3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4 laporan</b>	<b>331,580,500</b>
						1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	14,381,000

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian Program	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Anggaran
						2 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1 Paket	16,890,000
						3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dok	10,300,000
						4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	290,009,500
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1</b>	<b>6,900,000</b>
						1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	6,900,000
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>77,789,500</b>
						1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,689,500
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1 Laporan	57,100,000
						3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	18,000,000
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7 Unit</b>	<b>79,334,000</b>
						1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	51,934,000
						2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	7,400,000
						3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	20,000,000

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2025**

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian Program	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi		
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
I	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan, sarana dan prasarana pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang berkelanjutan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		146.563,73 Ton	2,967,460,000	146.549,07 Ton	2,886,551,201	
							<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	540 Orang	2,967,460,000	530 Orang	2,886,551,201
						1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	200 Orang	200,000,000	190 Orang	162,627,000
						2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	68 Kelompok	2,767,460,000	68 Kelompok	2,723,924,201
				Jumlah produksi Perikanan Budidaya	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		5.273,10 Ton	200,000,000	9.038,48 Ton	178,992,587	
							<b>Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	10 Kelompok	200,000,000	10 Kelompok	178,992,587
						1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	5 kelompok	100,000,000	5 Keompok	82,814,173
						2	Pemberiaan Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi	5 kelompok	100,000,000	5 Keompok	96,178,414
				Angka Konsumsi Ikan	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		43,5 Kg/Kapita/Thn	119,626,000	46,75 Kg/kapita/thn	106,837,000	
			Meningkatnya pendapatan dan investasi daerah	Nilai retribusi Sub sektor Perikanan		<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	1 Laporan	119,626,000	1 Laporan	106,837,000	
						1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	100 Pelaku Usaha	119,626,000	100 Pelaku Usaha	106,837,000
II	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai SAKIP	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		74.02	3,975,290,560	74.02	3,802,075,417	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian Program	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
						<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9 Dok/2 laporan</b>	<b>176,120,000</b>	<b>9 Dok/10 laporan</b>	<b>162,880,000</b>
						1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	33,800,000	5 Dok	33,800,000
						2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2,000,000	1 Dok	2,000,000
						3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2,000,000	1 Dok	2,000,000
						4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2,000,000	1 Dok	2,000,000
						5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2,000,000	1 Dok	2,000,000
						6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	134,320,000	2 Laporan	121,080,000
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3,303,566,560</b>	<b>3 laporan</b>	<b>3,168,846,715</b>
						1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bln	3,009,956,560	40 Orang	2,939,636,715
						2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	292,610,000	1 Dok	228,210,000
						3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4 laporan</b>	<b>331,580,500</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>325,917,180</b>
						1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	14,381,000	1 Paket	14,300,000
						2 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1 Paket	16,890,000	1 paket	16,156,000
						3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dok	10,300,000	1 Dok	9,600,000
						4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	290,009,500	90 Laporan	285,861,180
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Unit</b>	<b>6,900,000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>6,900,000</b>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian Program	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target		Realisasi	
						1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	6,900,000	1 Unit	6,900,000
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 laporan</b>	<b>77,789,500</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>59,692,000</b>
						1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,689,500	1 Laporan	2,084,000
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	1 Laporan	57,100,000	1 Laporan	39,608,000
						3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	18,000,000	1 Laporan	18,000,000
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7 Unit</b>	<b>79,334,000</b>	<b>7 Unit</b>	<b>77,839,522</b>
						1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	51,934,000	3 Unit	50,439,522
						2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	7,400,000	3 Unit	7,400,000
						3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Unit Organisasi : **Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah**
2. Tugas : Menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Perikanan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan
  - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perikanan
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
  - d. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perikanan
  - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di bidang kelautan dan

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	Uraian	Target 2025	Realisasi 2025
1	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/kota	151.836,83 ton	155.587,55 ton
2	Angka Konsumsi Ikan	43,50 kg/kapita/tahun	46,75 kg/kapita/tahun
3	Nilai retribusi Sub Sektor Perikanan	Rp1,000,000,000	Rp830,373,000

## INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1. Nama Unit Organisasi : **Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah**
2. Tugas : Menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Perikanan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan
  - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perikanan
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
  - d. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perikanan
  - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati di bidang kelautan dan
4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) :

No.	Uraian	Target 2025	Realisasi 2025
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/kota	151.836,83 Ton	155.587,55 ton
	Produksi Perikanan Tangkap	146.563,73 Ton	146.549,07 Ton
	Produksi Perikanan Budidaya	5.273,1 Ton	9.038,48 Ton